

# ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG SEBELUM DAN SETELAH MEMPEROLEH OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP)

*Analysis Of The Financial Performance Of The Regional Government Of  
Sidenreng Rappang Regency Before And After Obtaining Fair Opinion  
Without Exemption (Wtp)*

**Akhsan<sup>1</sup>, Anwar Talib<sup>2</sup>, Hasriana Sabri<sup>3</sup>**

Email : [akhsan@gmail.com](mailto:akhsan@gmail.com)<sup>1</sup>, [anwartalib@gmail.com](mailto:anwartalib@gmail.com)<sup>2</sup>, [nanasabri77@gmail.com](mailto:nanasabri77@gmail.com)<sup>3</sup>

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Parepare  
Jl. Jend. Ahmad Yani No.Km.6, Bukit Harapan, Kec. Soreang, Kota Parepare, Sulawesi  
Selatan Kode Pos 91131

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio keserasian belanja dan rasio pertumbuhan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Dokumentasi. Teknik analisis data adalah teknik deskriptif kuantitatif dan analisis rasio kinerja keuangan berupa rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio keserasian belanja dan rasio pertumbuhan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tingkat kemandirian menunjukkan bahwa Kabupaten Sidenreng Rappang sebelum WTP dan Setelah WTP dikategorikan sebagai kemandirian instruktif atau dimana peranan pemerintah pusat masih dominan daripada peranan daerah itu sendiri. Rasio Efektivitas menunjukkan bahwa Kabupaten Sidenreng Rappang Sebelum WTP dan setelah WTP dikategorikan tidak efektif karena rata-rata nilai dibawah 100%, hal ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan Kabupaten Sidenreng Rappang belum bisa mencapai tujuan atau target yang telah ditetapkan atau direncanakan. Rasio Efisiensi menunjukkan bahwa Kabupaten Sidenreng Rappang sebelum WTP dan setelah WTP dikategorikan Efisien hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah cermat dalam memperhitungkan biaya yang dikeluarkan. Rasio Pertumbuhan menunjukkan bahwa Kabupaten Sidenreng Rappang Sebelum WTP dan Setelah WTP mengalami persentase yang belum stabil karena data yang ada masih naik turun. Hal tersebut disebabkan oleh faktor target dan realisasi penerimaan pendapatan daerah yang beragam setiap tahunnya. Dari hasil penelitian dikatakan bahwa hipotesis  $H_a$  diterima dan  $H_o$  ditolak atau tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan Pemerintah Daerah Sebelum WTP dan Setelah WTP di Kabupaten Sidenreng Rappang.

**Kata Kunci : Analisis, Kinerja Keuangan, Wajar Tanpa pengecualian (WTP)**

## Abstract

*This study aims to determine a comparison of the financial performance of the regional government of Sidenreng Rappang district based on the independence ratio, effectiveness ratio, efficiency ratio, spending harmony ratio, and growth ratio. The data collection technique used in this study is Documentation. The data analysis technique in this study is a quantitative descriptive technique and analysis of financial performance ratios in the form of independence ratios, effectiveness ratios, efficiency ratios, spending harmony ratios, and growth ratios.*

*The results showed that the level of independence indicated that Sidenreng Rappang District before and after WTP was categorized as instructive independence or where the role of the central government was still dominant compared to the role of the regions themselves. The effectiveness ratio shows that Sidenreng Rappang District before WTP and after WTP is categorized as ineffective because the average value is*

*below 100%, this shows that the financial performance of Sidenreng Rappang Regency has not been able to achieve the goals or targets that have been set or planned. The efficiency ratio shows that Sidenreng Rappang District before WTP and after WTP is categorized as Efficient, this shows that the local government has been careful in calculating the costs incurred. The growth ratio shows that the percentages of Sidenreng Rappang Before WTP and After WTP experienced unstable percentages because the available data was still fluctuating. This is caused by the target factor and the realization of regional income receipts that vary each year. From the results of the study it is said that the hypothesis  $H_a$  is accepted and  $H_o$  is rejected or there is no difference in the financial performance of the Regional Governments before and after WTP in Sidenreng Rappang Regency.*

**Keywords: Analysis, Financial Performance, Unqualified (WTP)**

## PENDAHULUAN

Penyelenggaraan otonomi daerah merupakan suatu harapan yang cerah bagi penyelenggaraan pembangunan secara keseluruhan dimana masing-masing daerah memiliki kesempatan untuk mengelola, mengembangkan dan membangun daerah masing-masing sesuai kebutuhan dan potensi yang dimiliki. Untuk merealisasikan penyelenggaraan otonomi daerah ini, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menetapkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Kemudian diperbaharui menjadi Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dori Saputra (2014).

Menurut UU 23 Tahun 2014 bahwa prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan pemerintahan yang ditetapkan dalam undang-undang. Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup, dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Dengan demikian, isi dan jenis otonomi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya. Adapun yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional. Untuk merealisasikan penyelenggaraan otonomi daerah maka diikuti sebuah perubahan paradigma baru pengelolaan aset daerah yang ditandai dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 2014 tentang pengelolaan aset daerah yang tertib, akuntabel, dan transparan kedepannya. Feldasintya Wardani (2017).

Analisis terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang akan menghasilkan informasi yang penting terutama untuk membuat kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah dan menilai apakah pemerintah daerah telah berhasil mengelola keuangannya dengan baik, serta memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Kemampuan Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan dapat dilihat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang mencerminkan kemampuan Pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintah, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk menganalisis kinerja Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2013-2018 adalah melakukan analisis Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Keserasian Belanja dan Rasio Pertumbuhan. Wita Liantino (2018).

Dalam jangka waktu 2013 hingga 2015 Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang sebelumnya belum pernah mendapatkan opini WTP dari hasil Pemeriksaan BPK RI akan tetapi pada tahun 2016 hingga 2018 Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang memperoleh opini WTP oleh BPK RI. Disisi lain pada tahun 2013-2015 penerimaan pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang masih didominasi oleh pendapatan transfer dari pemerintah pusat, hal tersebut menunjukkan

bahwa pendapatan asli daerah belum bisa dijadikan tumpuan dalam membiayai pengeluaran daerah.

**Tabel 1. Realisasi Pendapatan Asli Daerah dan Penerimaan Daerah Dalam Rupiah (Rp)**

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Total Penerimaan Daerah
2013	37.920.943.980,29	686.308.898.869,91
2014	64.628.526.309,80	742.083.647.719,41
2015	76.076.376.303,64	956.157.973037,02
2016	98.400.923.158,52	1.073.977.803.372,40
2017	146.032.092.013,43	1.146.147.990.552,00
2018	115.904.953.769,23	1.034.096.299.655,00

Sumber : Data diolah 2021.

Suatu Pemerintah daerah Kabupaten yang mendapatkan Opini WTP idealnya ada pembenahan dari sistem pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangannya. Pembenahan sistem pengelolaan dan pertanggungjawaban tersebut juga harus mengkaji dari siklus pengelolaan keuangan yaitu perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi. Dari uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang "Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Sebelum dan Setelah Memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)".

#### METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang. Waktu penelitian ini dapat dilakukan 3-4 bulan. Data kuantitatif adalah data dalam bentuk angka-angka dan dapat dinyatakan dalam satuan hitung (Sugiyono, 2007). Penelitian dilakukan dengan melakukan analisis atas laporan pemerintah daerah Kabupaten Sidenreng Rappang yang telah audit oleh BPK. Laporan yang akan dibandingkan yaitu Laporan Realisasi Anggaran periode tahun anggaran dari 2013 sampai dengan tahun anggaran 2018.

Analisis data merupakan proses untuk mengelompokkan pengurutan data kedalam ketentuan-ketentuan yang ada untuk memperoleh hasil sesuai dengan data yang telah didapatkan. Dalam penelitian ini penulis teknik analisis data kualitatif deskriptif (Sugiyono,2014) Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan untuk menganalisis data menurut Miles and Huberman (1984) dalam Sugiyono (2014) yaitu :

1. Reduksi data
2. Analisis Data

Adapun analisis yang digunakan adalah analisis rasio kinerja

- a. Rasio Kemandirian

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

- b. Rasio Efektivitas

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

- c. Rasio Efisiensi

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

## d. Rasio Keserasian Belanja

## 1) Rasio Belanja Operasi

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

## 2) Rasio Belanja Modal

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

## e. Rasio Pertumbuhan

$$\text{Rasio Pertumbuhan (r)} = \frac{P_n - P_o}{P_o} \times 100\%$$

**HASIL PENELITIAN**

**Tabel 2. Perhitungan Rasio Kemandirian Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2013-2018 (Dalam rupiah)**

Tahun	PAD	Dana Perimbangan	Rasio Kemandirian (%)	Pola Hubungan
<b>Sebelum WTP</b>				
2013	37.920.943.980,29	686.308.838.869,91	5.52%	Instruktif
2014	64.628.526.309,80	742.083.647.719,41	0.08%	Instruktif
2015	76.076.376.303,64	956.157.973.037,02	0.07%	Instruktif
<b>Rata-Rata</b>			<b>1.89%</b>	<b>Instruktif</b>
<b>Setelah WTP</b>				
2016	98.400.923.153,52	1.073.977.803.372,40	0.09%	Instruktif
2017	146.032.092.013,43	1.149.147.990.552,00	0.12%	Instruktif
2018	115.904.953.769,23	1.034.096.299.655,00	0.11%	Instruktif
<b>Rata-Rata</b>			<b>0.10%</b>	<b>Instruktif</b>

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2013-2018 (Data diolah 2021).

Dari Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2013-2018 dan dengan perhitungan rasio kemandirian yang diukur dengan akun Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana perimbangan maka dapat dihasilkan analisisnya sebagai berikut:

**Rasio Kemandirian Sebelum WTP**

$$\text{Tahun 2013} = \frac{37.920.943.980,29}{686.308.838.869,91} \times 100\% = 5.52\%$$

$$\text{Tahun 2014} = \frac{64.628.526.309,80}{742.083.647.719,41} \times 100\% = 0.08\%$$

$$\text{Tahun 2015} = \frac{76.076.376.303,64}{956.157.973.037,02} \times 100\% = 0.07\%$$

**Rasio Kemandirian Setelah WTP**

$$\text{Tahun 2016} = \frac{98.400.923.153,52}{1.073.977.803.372,40} \times 100\% = 0.09\%$$

$$\text{Tahun 2017} = \frac{146.032.092.013,43}{1.149.147.990.552,00} \times 100\% = 0.12\%$$

$$\text{Tahun 2018} = \frac{115.904.953.769,23}{1.034.096.299.655,00} \times 100\% = 0.11\%$$

**Tabel 3. Perhitungan Rasio Efektivitas Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2013-2018 (Dalam rupiah)**

Tahun	Anggaran PAD	Realisasi PAD	Rasio Efektivitas (%)	Kriteria
<b>Sebelum WTP</b>				
2013	44.146.778.000,00	37.920.943.980,29	0,85%	Tidak efektif
2014	84.289.908.000,00	64.628.526.309,80	76.67	Tidak efektif
2015	101.304.105.000,00	76.076.376.303,64	75.09	Tidak efektif
<b>Rata-Rata</b>			<b>50,87</b>	<b>Tidak efektif</b>
<b>Setelah WTP</b>				
2016	132.582.303.650,00	98.400.923.153,52	74.21	Tidak efektif
2017	163.408.876.000,00	146.032.092.013,43	89.36	Tidak efektif
2018	167.491.056.000,00	115.904.953.769,23	62.20	Tidak efektif
<b>Rata-Rata</b>			<b>75,25</b>	<b>Tidak efektif</b>

**Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2013-2018 (Data Diolah 2021)**

Dari Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2013-2018 dan dengan perhitungan rasio efektivitas yang diukur dengan akun realisasi pendapatan asli daerah (PAD) dan akun anggaran pendapatan asli daerah (PAD) maka dapat dihasilkan analisisnya sebagai berikut:

***Rasio Efektivitas Sebelum WTP***

$$\text{Tahun 2013} = \frac{37.920.943.980,29}{44.146.778.000,00} \times 100\% = 0,85\%$$

$$\text{Tahun 2014} = \frac{64.628.526.309,80}{84.289.908.000,00} \times 100\% = 76.67\%$$

$$\text{Tahun 2015} = \frac{76.076.376.303,64}{101.304.105.000,00} \times 100\% = 75.09\%$$

***Rasio Efektivitas Setelah WTP***

$$\text{Tahun 2016} = \frac{98.400.923.153,52}{132.582.303.650,00} \times 100\% = 74.21\%$$

$$\text{Tahun 2017} = \frac{146.032.092.013,43}{163.408.876.000,00} \times 100\% = 89.36\%$$

$$\text{Tahun 2018} = \frac{115.904.953.769,23}{167.491.056.000,00} \times 100\% = 62.20\%$$

**Tabel 4. Perhitungan Rasio Efisiensi Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2013-2018 (Dalam rupiah)**

Tahun	Realisasi Pendapatan	Realisasi Belanja	Rasio Efisiensi (%)	Kriteria
<b>Sebelum WTP</b>				
2013	745.706.400.450,20	730.344.969.985,00	97,94	Efisien
2014	820.880.887.909,21	797.451.846.345,00	97,14	Efisien
2015	1.064.876.798.940,66	1.010.238.600.977,92	94,86	Efisien
<b>Rata-Rata</b>			<b>96,64</b>	<b>Efisien</b>
<b>Setelah WTP</b>				
2016	1.184.966.741.717,92	1.144.563.801.765,00	96,59	Efisien
2017	1.304.893.387.615,43	1.298.748.117.451,00	99,52	Efisien
2018	1.192.419.015.591,23	1.094.471.572.291,73	91,78	Efisien
<b>Rata-Rata</b>			<b>95,96</b>	<b>Efisien</b>

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2013-2018 (Data Diolah 2021)

Dari Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2013-2018 dan dengan perhitungan rasio efisiensi yang diukur pada biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD dengan akun belanja yang direalisasikan dan akun realisasi penerimaan PAD maka dapat dihasilkan analisisnya sebagai berikut:

**Rasio Efisiensi Sebelum WTP**

$$\text{Tahun 2013} = \frac{730.344.969.985,00}{745.706.400.450,20} \times 100\% = 97,94\%$$

$$\text{Tahun 2014} = \frac{797.451.846.345,00}{820.880.887.909,21} \times 100\% = 97,14\%$$

$$\text{Tahun 2015} = \frac{1.010.238.600.977,92}{1.064.876.798.940,66} \times 100\% = 94,86\%$$

**Rasio Efisiensi Setelah WTP**

$$\text{Tahun 2016} = \frac{1.144.563.801.765,00}{1.184.966.741.717,92} \times 100\% = 96,59\%$$

$$\text{Tahun 2017} = \frac{1.298.748.117.451,00}{1.304.893.387.615,43} \times 100\% = 99,52\%$$

$$\text{Tahun 2018} = \frac{1.094.471.572.291,73}{1.192.419.015.591,23} \times 100\% = 91,78\%$$

**Tabel 5. Perhitungan Rasio Keserasian Belanja pada Belanja Operasi Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2013-2018 (Dalam Rupiah)**

Tahun	Total Belanja Operasi	Total Belanja	Rasio Belanja Operasi (%)
<b>Sebelum WTP</b>			
2013	602.025.018.292,00	730.344.969.985,00	82,43
2014	604.541.846.345,00	797.451.846.345,00	75,80
2015	682.921.223.377,92	1.010.238.600.977,92	67,59
<b>Rata-Rata</b>			<b>75,27%</b>
<b>Setelah WTP</b>			
2016	723.763.642.615,00R	1.144.563.801.765,00	63,23
2017	778.842.848.798,00	1.298.748.117.451,00	59,96
2018	775.088.697.362,73	1.094.471.572.291,73	70,81
<b>Rata-Rata</b>			<b>64,66%</b>

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2013-2018 (Data Diolah 2021)

Dari Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2013-2018 dengan perhitungan rasio keserasian belanja yang diukur pada total belanja operasi dibandingkan dengan total belanja daerah maka dapat dihasilkan analisisnya sebagai berikut:

#### Rasio Keserasian Belanja pada Belanja Operasi Sebelum WTP

$$\text{Tahun 2013} = \frac{602.025.018.292,00}{730.344.969.985,00} \times 100\% = 82,43\%$$

$$\text{Tahun 2014} = \frac{604.541.846.345,00}{797.451.846.345,00} \times 100\% = 75,80\%$$

$$\text{Tahun 2015} = \frac{682.921.223.377,92}{1.010.238.600.977,92} \times 100\% = 67,59\%$$

#### Rasio Keserasian Belanja pada Belanja Operasi Setelah WTP

$$\text{Tahun 2016} = \frac{723.763.642.615,00}{1.144.563.801.765,00} \times 100\% = 63,23\%$$

$$\text{Tahun 2017} = \frac{778.842.848.798,00}{1.298.784.117.451,00} \times 100\% = 59,96\%$$

$$\text{Tahun 2018} = \frac{775.088.697.362,73}{1.094.471.572.291,73} \times 100\% = 70,81\%$$

**Tabel 6. Perhitungan Rasio Keserasian Belanja pada Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2013-2018 (Dalam Rupiah)**

Tahun	Total Belanja Modal	Total Belanja	Rasio Belanja Modal (%)
<b>Sebelum WTP</b>			
2013	127.050.230.701,00	730.344.969.985,00	17,39
2014	188.906.226.129,00	797.451.846.345,00	23,68
2015	326.972.727.600,00	1.010.238.600.977,92	32,36
<b>Rata-Rata</b>			<b>24,47%</b>
<b>Setelah WTP</b>			
2016	419.727.359.700,00	1.144.563.801.765,00	36,67
2017	434.635.861.641,00	1.298.748.117.451,00	33,46
2018	317.750.314.929,00	1.094.471.572.291,73	29,03
<b>Rata-Rata</b>			<b>33,05%</b>

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2013-2018 (Data Diolah 2021)

Dari Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2013-2018 dengan perhitungan rasio keserasian belanja yang diukur pada total belanja modal dibandingkan dengan total belanja daerah maka dapat dihasilkan analisisnya sebagai berikut:

#### Rasio Keserasian Belanja pada Belanja Modal Sebelum WTP

$$\text{Tahun 2013} = \frac{127.050.230.701,00}{730.344.969.985,00} \times 100\% = 17,39\%$$

$$\text{Tahun 2014} = \frac{188.906.226.129,00}{797.451.846.345,00} \times 100\% = 23,68\%$$

$$\text{Tahun 2015} = \frac{326.972.727.600,00}{1.010.238.600.977,92} \times 100\% = 32,36\%$$

#### Rasio Keserasian Belanja pada Belanja Operasi Setelah WTP

$$\text{Tahun 2016} = \frac{419.727.359.700,00}{1.144.563.801.765,00} \times 100\% = 36,67\%$$

$$\text{Tahun 2017} = \frac{434.635.861.641,00}{1.298.748.117.451,00} \times 100\% = 33,46\%$$

$$\text{Tahun 2018} = \frac{317.750.314.929,00}{1.094.471.572.291,73} \times 100\% = 29,03\%$$

**Tabel 7. Perhitungan Rasio Pertumbuhan Pendapatan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2013-2018 (Dalam rupiah)**

Tahun	Realisasi PAD tahun ke-n	Realisasi PAD tahun n-awal	Rasio Pertumbuhan (%)
<b>Sebelum WTP</b>			
2013	37.920.943.980,29	36.158.851.507,94	0,06
2014	64.628.526.309,80	37.920.943.980,29	70,4
2015	76,076,376,303.64	64.628.526.309,80	17,71
<b>Rata-Rata</b>			<b>29,39</b>
<b>Setelah WTP</b>			
2016	98.400.923.153,52	76.076.376.303,64	29,34
2017	146.032.092.013,43	98.400.923.153,52	48,4
2018	115.904.953.769,23	146.032.092.013,43	-0,20
<b>Rata-Rata</b>			<b>25,84</b>

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2014-2018 (Data Diolah 2021)

Dari Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2013-2018 dengan perhitungan rasio pertumbuhan yang diukur dengan akun realisasi penerimaan PAD tahun sekarang dan tahun sebelumnya maka dapat dihasilkan analisisnya sebagai berikut:

#### **Rasio Pertumbuhan Sebelum WTP**

$$\text{Tahun 2013} = \frac{37.920.943.980,29 - 36.158.851.507,94}{36.158.851.507,94} \times 100\% = \mathbf{0,06\%}$$

$$\text{Tahun 2014} = \frac{64.628.526.309,80 - 37.920.943.980,29}{37.920.943.980,29} \times 100\% = \mathbf{70,4\%}$$

$$\text{Tahun 2015} = \frac{76.076.376.303,64 - 64.628.526.309,80}{64.628.526.309,80} \times 100\% = \mathbf{17,71\%}$$

#### **Rasio Pertumbuhan Setelah WTP**

$$\text{Tahun 2016} = \frac{98.400.923.153,52 - 76.076.376.303,64}{76.076.376.303,64} \times 100\% = \mathbf{29,34\%}$$

$$\text{Tahun 2017} = \frac{146.032.092.013,43 - 98.400.923.153,52}{98.400.923.153,52} \times 100\% = \mathbf{48,4\%}$$

$$\text{Tahun 2018} = \frac{115.904.953.769,23 - 146.032.092.013,43}{146.032.092.013,43} \times 100\% = \mathbf{-0,20\%}$$

### **PEMBAHASAN**

#### **1. Kemampuan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Periode 2013-2018 dengan menggunakan Rasio Efektivitas**

Diketahui bahwa Efektivitas PAD di Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2013 sebesar 0,85%, tahun 2014 sebesar 76,67%, tahun 2015 sebesar 75,09%, tahun 2016 sebesar 74,21%, tahun 2017 sebesar 89,36% dan tahun 2018 sebesar 62,20%. Efektivitas kinerja keuangan pada Kabupaten Sidenreng Rappang untuk tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 berjalan tidak efektif karena efektivitasnya masih dibawah 100%, hal ini menunjukkan bahwa belum bisa

merealisasikan PAD sesuai yang telah direncanakan karena Efektivitas kinerja keuangan di Kabupaten Sidenreng Rappang dalam kriteria Belum efektif.

Jadi untuk itu, Pemerintah Daerah harus mengoptimalkan penerimaan dari potensi pendapatannya yang telah ada. Inisiatif dan kemauan Pemerintah Daerah sangat diperlukan dalam upaya peningkatan PAD. Pemerintah Daerah harus mencari alternatif-alternatif yang memungkinkan untuk dapat mengatasi kekurangan pembiayaannya, dan hal ini memerlukan kreatifitas dari aparat pelaksanaan keuangan daerah untuk mencari sumber-sumber pembiayaan baru baik melalui program kerjasama pembiayaan dengan pihak swasta dan juga program peningkatan PAD.

## 2. Kemampuan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Periode 2013-2018 dengan menggunakan Rasio Efisiensi

Efisiensi Kinerja keuangan Kabupaten Sidenreng Rappang dalam kriteria Efisien. Pada tahun 2013, 2014, 2015, 2016,2017, dan 2018 rasio efisiensinya sebesar 97,94%, 97,14%, 94,86%, 96,59%, 99,52% dan 91,78% Tetapi dari segi rata-rata dalam rasio Efisiensi diketahui bahwa Sebelum WTP dan Setelah WTP dalam kriteria Efisien dengan rasio 96,64% dan 95,96%

Pada pemerintah Sidenreng Rappang tergolong efisien hal ini menandakan pemerintah daerah Kabupaten Sidenreng Rappang telah cermat dalam memperhitungkan biaya yang dikeluarkan.

## 3. Kemampuan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Periode 2013-2018 dengan menggunakan Rasio Keserasian Belanja

### a. Rasio Belanja Operasi.

Rasio belanja operasi kabupaten Sidenreng Rappang dalam kriteria negatif karena proporsi belanja operasi menurut (Halim 2016 pada Wirawan Suhedi,2019) bahwa Pada umumnya lebih mendominasi total belanja daerah, yaitu sekitar 60-90 persen sedangkan dapat dilihat pada tabel 5.4 rata-rata sebelum WTP 75,27% dan Setelah WTP turun 64,66%.

### b. Rasio Belanja Modal

Rasio belanja modal kabupaten Sidenreng Rappang dalam kriteria negatif karena proporsi belanja operasi menurut (Mahmudi, 2016 pada Wirawan Suhedi,2019) bahwa Pada umumnya proporsi belanja modal terhadap total belanja daerah adalah antara 5-20 persen sedangkan dapat rata-rata sebelum WTP 24,47% dan Setelah WTP turun 33,05%.

## 4. Kemampuan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Periode 2013-2018 dengan menggunakan Rasio Pertumbuhan

Disimpulkan bahwa rasio pertumbuhan kinerja keuangan Kabupaten Sidenreng Rappang Rasio pertumbuhan PAD yang lebih tinggi menunjukkan kemampuan daerah yang lebih baik dalam memperoleh PAD dan pertumbuhan APBD yang semakin besar maka rasio ini semakin baik.

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dilakukan maka sesuai dengan tujuan penelitian dapat disimpulkan beberapa hal berikut ini :

1. Tingkat kemandirian menunjukkan bahwa Kabupaten Sidenreng Rappang sebelum WTP dan Setelah WTP dikategorikan sebagai kemandirian instruktif atau dimana peranan pemerintah pusat masih dominan daripada peranan daerah itu sendiri.
2. Rasio Efektivitas menunjukkan bahwa Kabupaten Sidenreng Rappang Sebelum WTP dan setelah WTP dikategorikan tidak efektif karena rata-rata nilai dibawah 100%, hal ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan Kabupaten Sidenreng Rappang belum bisa mencapai tujuan atau target yang telah ditetapkan atau direncanakan.

3. Rasio Efisiensi menunjukkan bahwa Kabupaten Sidenreng Rappang sebelum WTP dan setelah WTP dikategorikan Efisien hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah cermat dalam memperhitungkan biaya yang dikeluarkan.
4. Rasio Keserasian Belanja menunjukkan bahwa Kabupaten Sidenreng Rappang dari segi:
  - a. Rasio Belanja Operasi menunjukkan bahwa kemampuan keserasian belanja Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun ke tahun mengalami naik turun. Dilihat dari rata-rata sebelum WTP belanja operasinya lebih tinggi dengan nilai 75,27% dibandingkan dengan setelah WTP rata-rata belanja operasinya senilai 64,66%. Hal ini karena menunjukkan sebagian besar anggaran belanja digunakan untuk belanja operasi terutama untuk Belanja Pegawai dan Belanja Barang Jasa.
  - b. Rasio Belanja Modal menunjukkan bahwa kemampuan keserasian belanja Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun ke tahun mengalami naik turun. Dilihat dari rata-rata sebelum WTP belanja operasinya lebih tinggi dengan nilai 24,47% dibandingkan dengan setelah WTP rata-rata belanja operasinya senilai 33,05%. Hal ini karena menunjukkan sebagian rasio belanja modal mengalami fluktuasi berkisara antara 18 – 23%. Sebagian besar belanja modal digunakan untuk belanja modal tanah, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan.
5. Rasio Pertumbuhan menunjukkan bahwa Kabupaten Sidenreng Rappang Sebelum WTP dan Setelah WTP mengalami persentase yang belum stabil karena data yang ada masih naik turun. Hal tersebut disebabkan oleh faktor target dan realisasi penerimaan pendapatan daerah yang beragam setiap tahunnya.
6. Dari hasil penelitian dikatakan bahwa hipotesis  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak atau tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan Pemerintah Daerah Sebelum WTP dan Setelah WTP di Kabupaten Sidenreng Rappang.

#### Saran

1. Bagi Pemerintah Daerah
 

Pemerintah Daerah harus mampu mengoptimalkan penerimaan dari potensi pendapatannya yang telah ada. Inisiatif dan kemauan Pemerintah Daerah sangat diperlukan dalam upaya peningkatan PAD. Peningkatan PAD bisa dilakukan Pemerintah Daerah dengan cara melaksanakan secara optimal pemungutan pajak dan retribusi daerah serta melakukan pengawasan dan pengendalian secara sistematis dan berkelanjutan untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan dalam pemungutan PAD oleh aparat daerah. Selain itu Pemerintah Daerah harus mencari alternatif-alternatif yang memungkinkan untuk dapat mengatasi kekurangan pembiayaannya, dan hal ini memerlukan kreativitas dari aparat pelaksanaan keuangan daerah untuk mencari sumber-sumber pembiayaan baru baik melalui program kerjasama pembiayaan dengan pihak swasta dan juga program peningkatan PAD, misalnya pendirian BUMD sektor potensial. Selain itu Pemerintah Daerah diharapkan dapat mengurangi ketergantungannya terhadap bantuan dari pemerintah pusat.
2. Bagi Peneliti Selanjutnya
 

Bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian sama diharapkan untuk lebih mendalam mengenai kinerja keuangan pada Pemerintah Daerah dengan menggunakan lebih banyak rasio lagi sehingga hasil penelitiannya bisa lebih andal dan akurat daripada penelitian oleh penulis ini. Diharapkan penelitian selanjutnya melakukan penelitian di lingkup yang lebih luas dari penelitian ini.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Dori Saputra* (2014). Analisis kemandirian dan efektivitas keuangan daerah pada kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat.

- Erna Hanisah Rohmah* (2013) Pengaruh profesionalisme auditor terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan
- Feldasintya Wardani* (2017). Analisis perbandingan kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di daerah istimewa Yogyakarta (DIY) tahun 2013-2017
- Nurabiah* (2018), Analisis Perbandingan Kinerja Pemerintah Daerah yang memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Pelajaran.co.id* (2020) Pengertian Keuangan Daerah : Tujuan, Ruang Lingkup, Prinsip dan Rasio Keuangan Daerah pemerintah daerah kota bandar lampung sebelum dan setelah memperoleh opini WTP.
- Rigel Nurul Fathah* (2017). Analisis Rasio Keuangan untuk Penilaian Kinerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul
- Riki Kurnia, Fefri Indra Arza* (2019), Analisis perbandingan kinerja keuangan pemerintah daerah yang memperoleh opini wtp dengan pemerintah daerah yang memperoleh opini non wtp (studi empiris pada laporan keuangan Kabupaten/Kota Di Provinai Sumatera Barat Tahun 2015-2017
- Rosmiaty Tarmizi, Khairudin, Ayu Jayadi* (2014). Analisis kinerja keuangan
- Supina Sino, Titin Ruliana, Imam Nazarudin Latif* (2017). Kinerja keuangan pemerintah daerah pada kantor sekretariat Kabupaten Kutai Barat.
- Taufik* (2017). Analisis perbandingan kinerja keuangan pemerintah kabupaten kota Se-Sumatera.
- Teguh Riyanto* (2015). Zahir accounting, 5 jenis opini audit laporan keuangan
- Wita Liantino* (2018). Analisis rasio keuangan daerah dalam menilai kinerja keuangan pada kantor Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aset Daerah (BPPKAD) di kota Surakarta